

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERJANJIAN PENETAPAN
INSENTIF DRIVER GOJEK**

(Studi Di Kantor Operator Dan Driver Gojek Bandar Lampung)

Skripsi

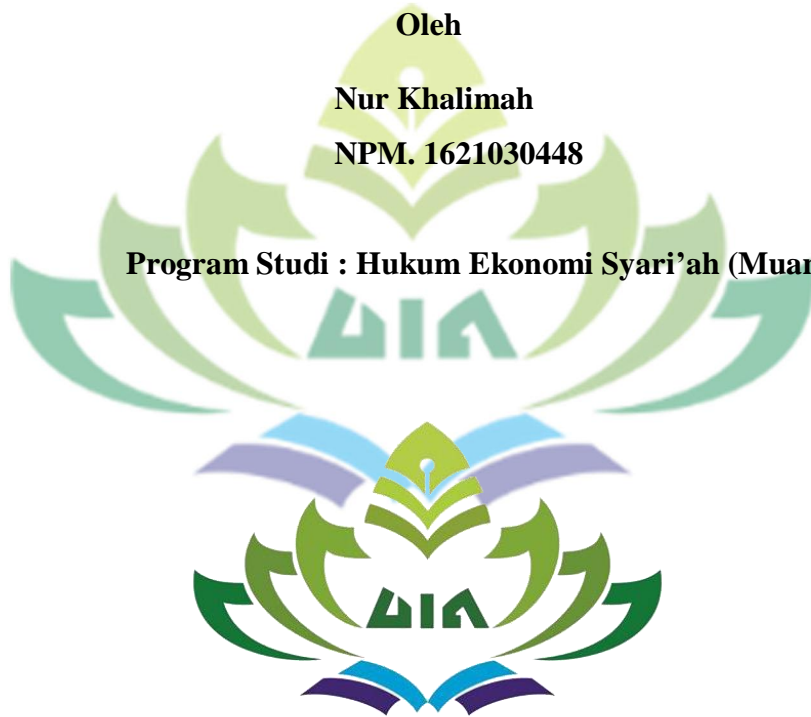
**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
dalam Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

Oleh

Nur Khalimah

NPM. 1621030448

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/2020 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERJANJIAN PENETAPAN
INSENTIF DRIVER GOJEK**

(Studi Di Kantor Operator Dan Driver Gojek Bandar Lampung)

Skripsi

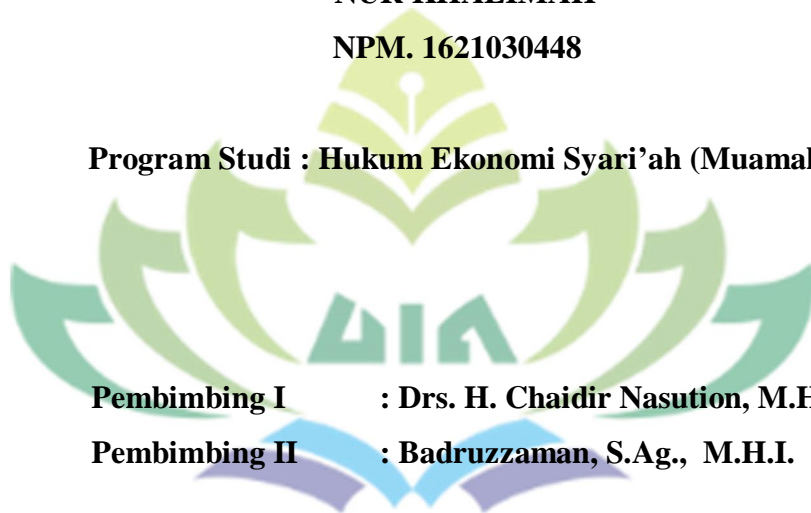
**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Hukum Ekonomi Syariah
(Muamalah)**

Oleh

NUR KHALIMAH

NPM. 1621030448

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)



Pembimbing I : Drs. H. Chaidir Nasution, M.H.

Pembimbing II : Badruzzaman, S.Ag., M.H.I.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/2020 M**

ABSTRAK

Kemajuan teknologi yang semakin berkembang ini banyak bermunculan ide-ide baru salah satunya yaitu terdapat pada model transportasi.. Dan di Indonesia transportasi merupakan salah satu jenis yang sering dibutuhkan oleh kalangan masyarakat. Model transportasi ini adalah salah satu aplikasi transportasi online yang merupakan aplikasi karya anak bangsa asli Indonesia. Dalam menjalankan bisnis transportasi online ini pihak dari perusahaan Gojek menjalin sistem kerjasama dengan pihak driver (pengemudi). Melalui sistem kerjasama inilah antara pihak kantor operator Gojek dengan driver Gojek dituangkan dalam perjanjian termasuk hak untuk mendapatkan insentif.

Permasalahan yang menjadi kajian peneliti ini adalah bagaimana perjanjian penetapan insentif driver gojek di Bandar Lampung dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang perjanjian penetapan insentif driver gojek di Bandar Lampung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perjanjian penetapan insentif driver gojek di Bandar Lampung dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang perjanjian penetapan insentif driver gojek di Bandar Lampung.

Penelitian ini adalah penelitian Lapangan (*Field Reserch*) dan penelitian ini bersifat deskriptif analisis, sumber data yaitu data primer dan data sekunder, populasi dan sampel dilakukan pada pihak kantor gojek di Bandar Lampung, pihak driver gojek, teknik pengumpulan data berupa wawancara, obsevasi dan dokumentasi, metode pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data dan sistematika data, teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif Analisis dan metode induktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa perjanjian penetapan insentif pada driver gojek mengacu pada ketentuan perusahaan yang berlaku nasional. Terjadinya penurunan insentif pada driver Gojek didasarkan atas kebijakan dari kantor operator Gojek di Bandar Lampung yang dilakukan secara sepihak (tidak melibatkan driver Gojek). Hal ini dimungkinkan karna dalam aturan yang berlaku secara nasional tidak menyebutkan atau diatur secara tegas melalui mekanisme musyawarah. Menurut hukum Islam perjanjian penetapan insentif pada driver Gojek yang berlaku secara nasional dapat dibenarkan karena ditetapkan melalui mekanisme musyawarah. Adapun penurunan insentif pada driver Gojek oleh kantor operator Gojek di Bandar Lampung tidak menyalahi aturan yang ditetapkan oleh perusahaan Gojek secara nasional. Namun jika penurunan insentif driver Gojek tersebut dilakukan melalui mekanisme musyawarah atau melalui tahapan sosialisasi terlebih dahulu pada driver Gojek, akan lebih baik dan tidak menimbulkan gejolak dikalangan para driver Gojek.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Khalimah
NPM : 1621030448
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perjanjian Penetapan Insentif Driver Gojek (Studi Di Kantor Operator Dan Driver Gojek Bandar Lampung)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saluran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya **penyimpangan** dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada **penyusun**.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 24 September 2020

Penulis,



Nur Khalimah

NPM. 1621030448



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG
PERJANJIAN PENETAPAN INSENTIF DRIVER
GOJEK (Studi Di Kantor Operator Dan Driver Gojek
Bandar Lampung)**

Nama : NUR KHALIMAH

NPM : 1621030448

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.**

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Chaidir Nasution, M.H.

Badruzzaman, S.Ag., M.H.I.

NIP. 195802011986031002

NIP. 196806241997031003

Mengetahui,

Ketua Jurusan Mu'amalah

Khoiruddin, M.S.I.

NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERJANJIAN PENETAPAN INSENTIF DRIVER GOJEK (Studi Di Kantor Operator Dan Driver Gojek Bandar Lampung)**. Disusun oleh Nur Khalimah NPM. 1621030448. Program Studi Mu'amalah, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Kamis, 01 Oktober 2020

TIM MUNAQASYAH

Ketua : Marwin, S.H., M.H.

Sekretaris : Hasanuddin Muhammad, M.H.

Penguji Utama : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag.

Penguji II : Drs. H. Chaidir Nasution, M.H.

Penguji III : Badruzzaman, S.Ag., M.H.I.



Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Khairuddin., M.H.

NPM. 196210221993031002

MOTTO

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ 

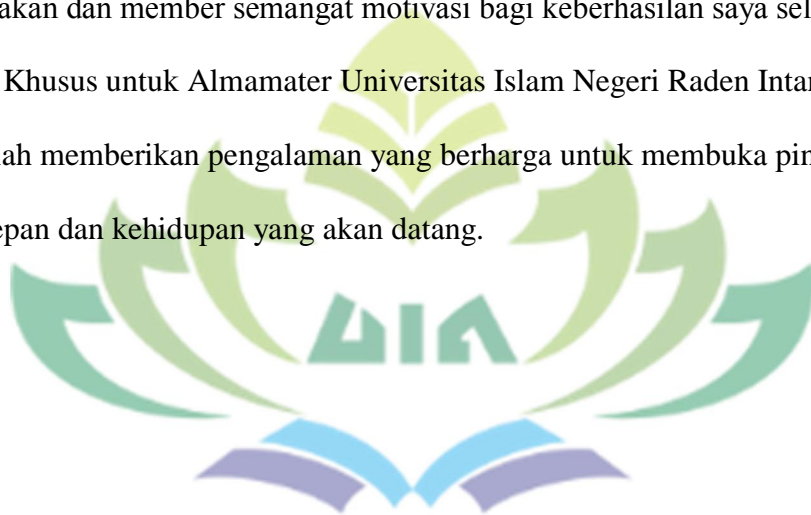
“Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu”

(Q.S. Ali-Imran: 159)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada Ayahanda Sholihin dan ibuku tercinta Tutik Miarti, terimakasih atas segala kerja keras yang bapak dan ibu berikan untukku, terimakasih atas do'a yang selalu dipanjatkan untuk kelancaran dan kesuksesanku, terimakasih selalu memberiku semangat dan motivasi, terimakasih perjuangan kalian yang tiada henti untuk memberikan segala kasih sayang kalian. Terimakasih banyak orang tuaku yang terbaik dalam hidupku, Kakak ku tercinta Khoirul Huda dan Adik ku tercinta Mukhlisin yang selalu mendukung, mendo'akan dan member semangat motivasi bagi keberhasilan saya selama belajar, Khusus untuk Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan pengalaman yang berharga untuk membuka pintu dunia masa depan dan kehidupan yang akan datang.



RIWAYAT HIDUP

Nur Khalimah dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 24 september 1996, anak kedua dari tiga bersaudara oleh pasangan Bapak Sholihin dan Ibu Tutik Miarti. Pendidikan dimulai dari TK Islam Adz-dzikri Bandar Lampung dan selesai tahun 2003, SD Negeri 2 Way Halim Permai Bandar Lampung dan selesai tahun 2009, SMP Negeri 12 Bandar Lampung dan selesai tahun 2012, SMA Surya Dharma 2 Bandar Lampung dan selesai tahun 2015, dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Tahun akademik 2016/2017.



Bandar Lampung, 24 September 2020

Yang membuat,

Nur Khalimah

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul: Tinjauan Hukum Islam Tentang Perjanjian Penetapan Insentif Driver Gojek (Studi Di Kantor Operator Dan Driver Gojek Bandar Lampung) dapat diselesaikan. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad Saw, para sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang setia.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program strata satu (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang ilmu Syariah.

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi tersebut. Oleh karena itu penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat atas penulisan skripsi ini. Secara khusus penulis ucapkan terimakasih kepada bapak:

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. H. Khairuddin Tahmid., M.H. selaku dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

3. Khoiruddin, M.S.I. selaku ketua jurusan muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa mengarahkan dan memberi motivasi kepada penulis sehingga terselesaikan skripsi ini.
4. Drs. H. Chaidir Nasution, M.H. Selaku dosen pembimbing I yang telah sabar dan bersedia meluangkan waktu, tenaga serta pikiran dalam membimbing, mengarahkan dan memotivasi hingga terselesainya skripsi ini.
5. Badruzzaman, S.Ag., M.H.I. Selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, pengarahan atas petunjuk dan saran dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah member ilmu, pengalaman dan pelajaran kepada penulis selama proses perkuliahan.
7. Kepala Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan Fakultas Syari'ah yang telah memberikan informasi, data, dan referensi, dan lain-lain.
8. Karyawan kantor gojek di Bandar Lampung yang telah membantu dalam proses penelitian sampai penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada khoirul Huda mamas tercinta yang telah membantu saya dalam pembuatan skripsi ini terima kasih atas bantuannya dan semangatnya.
10. Sahabat seperjuangan Linda Silviana, Intan Adelia Andini, Deva Dwi Pebianti, Meli Melani, Lia Hernita, Mutiara Anggun, Neneng Nurmila

Sari, terima kasih atas semua semangatnya dan selalu ada disaat saya lagi kesusahan.

11. Teman-teman angkatan 2016 Fakultas Syariah Jurusan Muamalah khususnya kelas Muamalah I.
12. Kepada saudara sekelas Nur Winda, Nur Hadi dan Nur Fauzi terima kasih atas semangatnya.
13. Teman-teman KKN kelompok 231 yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, terima kasih atas semangatnya.
14. Kepada teman-teman kerja di Trans Studio Mini Lampung terima kasih atas semangatnya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, hal itu tidak lain disebabkan karena kemampuan waktu yang dimiliki. Untuk itu kiranya para pembaca dapat memberikan masukan dan saran-saran, guna melengkapi tulisan ini. Akhirnya diharapkan betapapun kecilnya karya tulis (skripsi) ini dapat menjadi amal jariah dan ilmu yang bermanfaat bagi siapapun.

Bandar Lampung, 24 September 2020

Nur Khalimah

NPM. 1621030448

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	vi
PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah.....	2
D. Fokus Penelitian	5
E..Rumusan Masalah	5
F..Tujuan Penelitian.....	6
G. Signifikansi Penelitian.....	6
H. Metode Penelitian.....	6

BAB II : LANDASAN TEORI

A. PERJANJIAN (AKAD) DALAM ISLAM	13
1. Pengertian & Dasar Hukum Akad	13
2. Rukun & Syarat Akad	16
3. Macam-macam Akad	22
4. Sah & Batalnya Akad	28
5. Akibat Hukum Akad	40
6. Asas-Asas Akad	41
7. Berakhirnya Akad	45

B. TINJAUAN PUSTAKA.....	48
--------------------------	----

BAB III : LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Profil Perusahaan Gojek.....	51
1. Sejarah Berdirinya	51
2. Visi & Misi	52
3. Struktur Organisasi	53
4. Jenis-jenis Layanan	54
5. Kebijakan	56
B. Sistem Penetapan Insentif	61

BAB IV : ANALISIS

A. Analisis Perjanjian Penetapan Insentif Driver Gojek Di	
---	--

Bandar Lampung.....	68
B. Analisis Hukum Islam Tentang Perjanjian Penetapan Insentif Driver Gojek Di Bandar Lampung	72
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	75
B. Rekomendasi.....	76
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum menjelaskan lebih lanjut serta menguraikan isi skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini. Skripsi yang berjudul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERJANJIAN PENETAPAN INSENTIF DRIVER GOJEK** yaitu sebagai berikut :

1. Tinjauan yaitu hasil meninjau, pandangan pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).¹
2. Hukum Islam adalah ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah SWT berupa aturan dan larangan bagi umat islam²
3. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya³
4. Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan untuk meningkatkan gairah kerja. Insentif yang penulis maksudkan dalam konteks judul adalah insentif harian dengan driver Gojek⁴
5. Gojek atau PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa merupakan perusahaan teknologi asli Indonesia yang melayani angkutan jasa ojek⁵

¹Kamus besar bahasa indonesia pusat Bahasa edisi Keempat Departemen Pendidikan Nasional (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h.1470

² Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h.154

³Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta : Citra Aditya Bakti, 2014), h.289

⁴Kamus besar bahasa indonesia dalam jaringan/online, KKBI pusat bahasa

⁵Wikipedia, pengertian gojek

Dari beberapa penjelasan diatas, maka yang dimaksud dalam judul skripsi ini adalah sebuah kajian yang akan memfokuskan tentang perjanjian penetapan insentif driver gojek yang ditinjau berdasarkan hukum Islam di kantor operator dan driver gojek Bandar Lampung.

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan Objektif

- a. Driver gojek merupakan profesi atau pekerjaan yang mendatangkan hasil untuk memenuhi sebagian kebutuhan hidup, tumbuh, khususnya dikota-kota besar.
- b. Antara perusahaan gojek dan driver gojek diikat adanya perjanjian sebagai ikatan dan dasar kemitraan.

2. Alasan Subjektif

- a. Pembahasan judul ini memiliki relevan dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari dibidang muamalah fakultas syariah UIN RIL.
- b. Selain tersedianya referance sebagai rujukan penulisan juga objek penelitian dapat dijangkau dan memungkinkan.

C. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi yang semakin berkembang ini banyak bermunculan ide-ide baru salah satunya yaitu terdapat pada model transportasi. Kemajuan teknologi pada transportasi ini dapat memenuhi kebutuhan manusia yang ingin semakin cepat dan mudah. Dan di Indonesia transportasi merupakan salah satu jenis yang sering dibutuhkan oleh kalangan

masyarakat. Model transportasi ini adalah salah satu aplikasi transportasi online yang merupakan aplikasi karya anak bangsa asli Indonesia. Transportasi online ini memanfaatkan aplikasi sebagai media pemesanan dengan menggunakan handphone. Cara penggunaannya sangat mudah hanya dengan mendownload aplikasinya lewat handphone dan mengeklik sesuai dengan yang ingin dibutuhkan. Banyak masyarakat Indonesia yang kemudian tertarik menggunakan transportasi online ini guna untuk memudahkan mereka dalam menjalani aktifitas sehari-hari.

Dalam menjalankan bisnis transportasi online ini pihak dari perusahaan Gojek menjalin sistem kerjasama dengan pihak driver (pengemudi). Melalui sistem kerjasama inilah antara pihak kantor operator Gojek dengan driver Gojek dituangkan dalam perjanjian termasuk hak untuk mendapatkan insentif harian. Bagaimana sistem penetapan insentifnya dan bagaimana terjadinya penurunan insentif yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan. Istilah perjanjian dalam hukum Islam disebut akad. Kata akad berasal dari kata al-aqd yang berisi mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*). Akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang dilakukan oleh salah satu pihak dan kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing

pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam ijab dan kabul.⁶

Dalam hukum Islam terdapat beberapa kaidah penafsiran hukum pada umumnya, termasuk kaidah penafsiran akad yang harus dipedomani dalam menafsirkan akad yang dirumuskan oleh para pihak. Kaidah-kaidah ini memang lebih banyak tertuju kepada akad yang dirumuskan dalam kata-kata, baik kata-kata lisan maupun tertulis. Akad yang ijab dan kabulnya disampaikan melalui ucapan, tulisan semuanya adalah perjanjian yang tercipta dengan perantaraan kata. Memang perjanjian melalui kata-kata inilah yang merupakan bagian terbesar dari perjanjian. Kontrak- kontrak besar lazimnya, terutama di zaman modern dibuat secara tertulis dan dengan demikian menggunakan kata. Perjanjian yang tidak menggunakan kata adalah yang disampaikan dengan isyarat, secara diam-diam, atau diam semata. Ini merupakan bagian kecil dari perjanjian dan melibatkan perjanjian berskala kecil. Penafsiran perjanjian adalah upaya menentukan apa yang menjadi maksud bersama para pihak.

Hal ini adalah karena perjanjian itu tidak lain dari kesepakatan para pihak yang bersangkutan. Bukan kehendak salah satu pihak yang tidak bertemu dengan kehendak pihak lain. Ini sejalan dengan penegasan dalam kaidah hukum Islam yang berbunyi, "Pada dasarnya akad itu adalah kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan atas diri mereka melalui janji." Kaidah ini juga dimasukkan menjadi

⁶ Syamsul Anwar, *hukum perjanjian syariah*, (jakarta : RajaGrafindoPersada, 2007), h. 68-69

salah satu Pasal dalam beberapa kitab undang-undang hukum perdata yang bersumber kepada hukum Syariah.⁷

Dan pihak driver Gojek akan mendapatkan insentif harian apabila sudah mencapai target dalam memperoleh penumpang yang telah ditentukan pihak kantor operator Gojek. Yang dimaksud dengan insentif harian pada driver Gojek adalah tambahan penghasilan yang diberikan untuk memotivasi kinerja kerja driver Gojek.

Berdasarkan uraian di atas penyusun merasa tertarik untuk melakukan penelitian dan penyusunan skripsi dengan berjudul: Tinjauan Hukum Islam Tentang Perjanjian Penetapan Insentif Driver Gojek.

D. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas maka fokus dalam penelitian ini adalah sebuah kajian yang akan memfokuskan sistem perjanjian penetapan insentif driver gojek yang ditinjau berdasarkan hukum Islam pada kantor Gojek di Bandar Lampung. Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian secara sepihak karena penelitian ini hanya dilakukan pada kantor Gojek di Bandar Lampung.

E. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perjanjian penetapan insentif driver gojek di Bandar Lampung?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang perjanjian penetapan insentif driver gojek di Bandar Lampung?

⁷ Elsi Kartika, advendi simanunsong, *hukum dalam ekonomi*, (jakarta :Grasindo, 2008), h. 302

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perjanjian penetapan insentif driver Gojek di Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang perjanjian penetapan insentif driver Gojek di Bandar Lampung?

G. Signifikansi Penelitian

1. Secara teoritis yaitu sebagai sumbangan bagi pengembangan pemikiran hukum Islam khususnya berkaitan dengan realita yang terjadi mengenai perjanjian penetapan insentif driver gojek di Bandar Lampung.
2. Secara praktis yaitu dapat memberikan manfaat, memperluas wawasan bagi masyarakat umum dan dapat memahami pandangan hukum Islam mengenai perjanjian penetapan insentif driver gojek di Bandar Lampung.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁸ Untuk memperoleh dan membahas data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

- a. Jenis Penelitian yang penyusun lakukan adalah jenis penelitian lapangan (field research) yaitu dengan mencari data secara langsung kelapangan.⁹ Disamping itu penyusun juga menyertakan penelitian pustaka (library research) meskipun data yang nantinya diperoleh

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung : ALFABETA, 2018), h. 2

⁹Kartini Kartono, *Pengantar Metode Riset* (Alumni Bandung: 1986), h. 27

sebagian besar dari lapangan namun dari data pustaka ini sebagai aturan teori yang nantinya akan digunakan dan dijadikan dasar-dasar penelitian.

- b. Sifat Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang memaparkan dan melaporkan keadaan, objek, gejala, kebiasaan perilaku tertentu kemudian dianalisis.¹⁰

2. Sumber Data Penelitian

Sedangkan data yang akan dicari yaitu data primer dan data sekunder:

- a. Data primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli lapangan atau lokasi penelitian yang memberikan informasi langsung pada peneliti yaitu data hasil wawancara dikantor Gojek Bandar Lampung.

- b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari perpustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat sebagai bahan yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Kemudian disaring dan dituangkan dalam penelitian ini.

3. Populasi dan Sampel

- a. Populasi

Populasi menurut kamus riset karangan Drs. Komaruddin yaitu semua individu yang menjadi sumber pengambilan sampel.¹¹

¹⁰ Ibid, h. 34

¹¹ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta : PT. Bumi Aksara : 2014), h. 53

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Maksudnya ialah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.¹² Adapun yang menjadi populasi dalam perjanjian penetapan insentif driver gojek di Bandar Lampung adalah pihak kantor gojek di Bandar Lampung dan 10 orang yang menjadi driver gojek di Bandar Lampung.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Sampel yaitu bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya.¹³

Dari pengertian- pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Pengambilan sampel untuk penelitian menurut Suharsimi Arikunto, jika subjeknya kurang dari 100 orang sebaiknya di ambil semuanya, jika subjeknya besar atau lebih dari 100 maka dapat diambil 10-15% atau 20-25% atau lebih.

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Renika Cipta, 1991), h. 102.

¹³ Amiruddin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), h.95.

Karena populasi dalam penelitian ini kurang dari 100, yaitu 10 orang, maka keseluruhan populasi diambil semua dan dijadikan sebagai sampel, dalam sampel ini penulis memilih 1 orang petugas dari kantor operator driver Gojek di Bandar Lampung.

4. Pengumpulan Data

a. wawancara (Interview)

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatapmuka, mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹⁴

Berdasarkan tersedianya *interview guide* dan jumlah interview dikenal:

1) Interview Terpimpin

Dikenal pula sebagai *guide interview/ controlled interview/ structured interview* dimana interviewer:

- a) Mempergunakan pedoman yang telah disiapkan dalam rangka Tanya jawab dengan suatu hipotesis yang akan dibuktikan kebenarannya.
- b) Mengumpulkan data melalui Tanya jawab.
- c) Mempunyai data yang relevan dengan maksud penyelidikan yang telah dipersiapkan dengan matang.

2) Interview Tak Terpimpin

¹⁴ Cholid Narbuko dan Abu Achmad, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 83.

Dikenal pula sebagai *unguided interview/ non detective interview* dimana proses interview tidak dikendalikan oleh suatu pedoman yang telah disiapkan oleh interviewer sehingga akan berubah menjadi semacam pembicaraan bebas (*free talk*).

3) Interview Bebas Terpimpin

Merupakan kombinasi antara interview terpimpin dan interview tak terpimpin.

b. Observasi

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.¹⁵

c. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, ledger, agenda dan sebagainya.¹⁶

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan kepada subjek penelitian. Dokumen dapat dibedakan menjadi *dokumen primer*, jika dokumen ini ditulis oleh orang yang langsung mengalami suatu peristiwa dan *dokumen sekunder*, jika peristiwa dilaporkan orang lain yang selanjutnya ditulis

¹⁵ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995), h. 70-71.

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 188.

oleh orang lain. Otobiografi adalah contoh dokumen primer dan biografi seseorang adalah contoh dokumen sekunder.¹⁷

Data- data tersebut dapat berupa letak geografis, kondisi masyarakat maupun kondisi adat kebudayaan serta hal- hal lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

5. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan suatu proses untuk memperoleh data ringkasan berdasarkan kelompok data mentah. Data mentah yang telah dikumpulkan oleh peneliti tidak akan ada gunanya bila tak diolah. Pengolahan data juga merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan pengolahan data, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.¹⁸

Setelah data yang diperlukan terkumpul baik dari perpustakaan, maka diolah dengan secara sistematis, sehingga menjadi hasil pembahasan dan gambaran data, pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, sudah selesai (*relevan*) dengan masalah.
- b. Sistematika data (*sistemazing*), yaitu melakukan pengecekan terhadap data- data atau bahan- bahan yang telah diperoleh secara

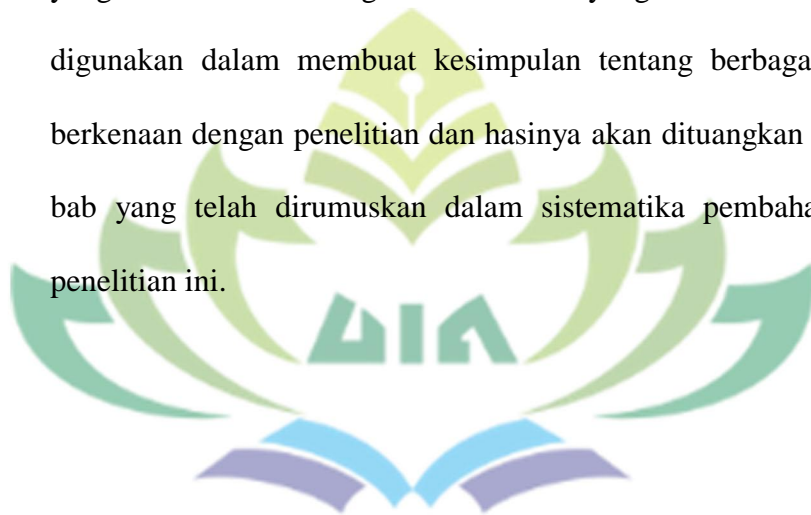
¹⁷Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995), h. 70-71.

¹⁸Nasir, Mohammad, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), h. 23.

sistematis, terarah dan beraturan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.

6. Analisis Data

- a. Deskriptif Analisis, yaitu dengan cara menuturkan dan menjelaskan data yang terkumpul. Tujuan metode ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis.
- b. Metode induktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki. Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan penelitian dan hasilnya akan dituangkan dalam bab-bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan dalam penelitian ini.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perjanjian (Akad) Dalam Islam

1. Pengertian dan Dasar Hukum Akad

Definisi Akad istilah perjanjian dalam hukum Indonesia, disebut akad dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata *al-'aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*).¹⁹ Dalam menjalankan bisnis, satu hal yang sangat penting adalah masalah akad (perjanjian). Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari.²⁰ Akad secara etimologi, antara lain berarti ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dua segi. Akad juga berarti sambungan (*al-uqdah*) dan janji (*al-'ahd*).²¹

Definisi di atas memperlihatkan bahwa pertama, akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama, Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam ijab dan kabul. Kedua, akad merupakan tindakan hukum dua pihak

¹⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h.

²⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Fajar Interpretama Mandiri, 2012), h. 71

²¹ Rachmat Syafei, *Fikih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 43

karena akad adalah pertemuan ijab yang merepresentasikan kehendak dari satu pihak dan kabul yang menyatakan kehendak pihak lain. Konsepsi akad sebagai tindakan dua pihak adalah pandangan ahli-ahli Hukum Islam modern.²²

Pada zaman pra modern terdapat perbedaan pendapat. Sebagian besar fukaha memang memisahkan secara tegas kehendak sepihak dari akad, akan tetapi sebagian lain menjadikan akad meliputi juga kehendak sepihak. Bahkan ketika berbicara tentang aneka ragam akad khusus mereka tidak membedakan antara akad dan kehendak sepihak sehingga mereka membahas pelepasan hak, wasiat dan wakaf bersama-sama dengan pembahasan mengenai jual beli, sewa- menyewa dan semacamnya, serta mendiskusikan apakah hibah memerlukan ijab dan kabul atau cukup ijab saja. Ketiga, tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum.²³

Lebih tegas lagi tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad. Akibat hukum akad dalam hukum Islam disebut hukum akad (hukum *Al-'aqd*). Tujuan akad untuk akad bernama sudah ditentukan secara umum oleh pembuat hukum syariah. Sementara tujuan akad untuk akad tidak bernama ditentukan oleh para pihak sendiri sesuai dengai maksud mereka menutup akad. Tujuan akad bernama dapat dikategorikan menjadi lima, yaitu:

²² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h.

²³ Sholikul Hadi, *Fiqh Muamalah*, (Kudus: Nora Interprise, 2011), h. 45.

- a. Pemindahan milik dengan imbalan ataupun tanpa imbalan (*at-tamlik*);
- b. Melakukan pekerjaan (*Al-'amal*),
- c. Melakukan persekutuan (*Al-isytirak*),
- d. Melakukan pendelegasian (*At-tafwidh*);
- e. Melakukan penjaminan (*At-tausiq*).²⁴

Dasar Hukum Akad merupakan cara yang diridhai Allah dan harus ditegakkan isinya. Hal ini sebagaimana dijelaskan di Al-qur'an dalam surah Ali Imran ayat 76 yang berbunyi:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

Artinya: (Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)Nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.²⁵

Dan dalam surah Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.²⁶

²⁴ *Ibid*, h. 70

²⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Jakarta: Darus Sunnah, 2015), h. 60.

²⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Jakarta: Darus Sunnah, 2015), h. 107.

Kata akad berasal dari bahasa Arab *Al-aqdu* dalam bentuk jamak disebut *Al-uquud* yang berarti ikatan atau simpul tali.'

Menurut para ulama fiqh, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Rumusan akad di atas mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus.

Akad ini diwujudkan pertama, dalam ijab dan kabul. Kedua, sesuai dengan kehendak syariat. Ketiga, adanya akibat hukum pada objek perikatan. Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau transaksi dapat diartikan sebagai kemitraan yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah.²⁷

2. Rukun Dan Syarat Akad

Setiap akad harus memenuhi rukun dan syarat sahnya. Rukun akad yang dimaksud adalah unsur yang harus ada dan merupakan esensi dalam setiap kontrak. Jika salah satu rukun tidak ada, menurut hukum perdata Islam kontrak dipandang tidak pernah ada. Sedangkan syarat adalah suatu sifat yang mesti ada pada setiap rukun, tetapi bukan merupakan esensi akad.²⁸ Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang

²⁷ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 63.

²⁸ Oni Sahroni, Hasanuddin, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), h. 25

membentuknya. Rumah, misalnya, terbentuk karena adanya unsur- unsur yang membentuknya, yaitu fondasi, tiang, lantai, dinding, atap dan seterusnya. Dalam konsepsi hukum Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun. Akad juga terbentuk karena adanya unsur-unsur atau rukun-rukun yang membentuknya Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat yaitu:

- a. Para pihak yang membuat akad (*al-'uqidan*)
- b. Pernyataan kehendak para pihak (*shigatul-'aqd*)
- c. Objek akad (*mahallul-'aqd*)
- d. Tujuan akad (*matudhu al-'ayd*).

Rukun yang disebutkan di atas harus ada untuk terjadinya akad. Kita tidak mungkin membayangkan terciptanya suatu akad apabila tidak ada pihak yang membuat akad, atau tidak ada pernyataan kehendak untuk berakad, atau tidak ada objek akad, atau tidak ada tujuannya. Hanya saja dalam kaitan ini perlu dicatat bahwa sesungguhnya para ahli hukum Islam sepakat bahwa rukun adalah unsur yang membentuk substansi sesuatu. Akan Tetapi, ketika pengertian itu diterapkan secara nyata kepada akad, terjadi perbedaan tentang unsur mana saja yang merupakan bagian yang membentuk akad. Apakah para pihak dan objek akad-yang merupakan suatu unsur luar dari akad merupakan rukun? Dalam hal ini jumbuh (mayoritas) ahli hukum Islam memandang demikian.

Bagi mazhab Hanafi yang dimaksud dengan rukun akad adalah unsur-unsur pokok yang membentuk akad. Akad sendiri adalah

pertemuan kehendak para pihak dan kehendak itu diungkapkan melalui yang berupa ucapan atau bentuk ungkapan lain dari masing-masing pihak. Oleh karena itu, unsur pokok yang membentuk akad itu hanyalah pernyataan kehendak pernyataan kehendak masing-masing pihak berupa ijab dan kabul. Adapun para pihak dan objek akad adalah suatu unsur luar, tidak merupakan esensi akad, dan karena itu bukan rukun akad.

Namun mazhab ini mengakui bahwa unsur para pihak dan objek itu harus ada untuk terbentuknya akad. Tetapi unsur-unsur ini berada di luar akad, sehingga tidak dinamakan rukun. Rukun hanyalah substansi internal yang membentuk akad, yaitu ijab dan kabul saja. Sebenarnya, secara substansial kedua pandangan di atas tidak berbeda, karena ahli-ahli hukum Hanafi, yang menyatakan rukun akad hanyalah ijab dan kabul saja, mengakui bahwa tidak mungkin ada akad tanpa adanya para pihak yang membuatnya dan tanpa adanya objek akad. Perbedaan hanya terletak dalam cara pandang saja, tidak menyangkut substansi akad.²⁹

Suatu akad baru terbentuk bila terpenuhi rukun unsurnya. Adapun unsur akad yaitu :

1. Para pihak yang membuat akad (*al-'uqidan*)

Para pihak yang membuat atau disebut juga dengan subjek akad (sutas hukum). Subjek akad, dapat berbentuk orang perorang dan dapat ju dalam bentuk badan hukum. Adapun syarat subjek akad tersebut, yaitu:

²⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 95-97

- a. Seseorang yang mukallaf, yaitu orang yang telah kedudukan tertentu sehingga dia dibebani kewajiban-kewajiban tertentu. Patokan atau ukuran dalam penentuan mukallaf ini biasanya dengan ukuran baligh, yaitu telah mencapai umur tertentu sesuai ketentuan undang-undang, atau ditandai dengan datangnya tanda-tanda kedewasaan, seperti menstruasi pada wanita dan perubahan suara dan mimpi pada pria dan ukuran yang kedua adalah aqil yaitu tidak cacat akal pikiran. Kegunaan dari penentuan mukallaf ini adalah sebagai dasar pembebanan kewajiban.
- b. Badan hukum yang dimaksud dengan badan hukum suatu persekutuan (*syirkah*) yang dibentuk berdasarkan hukum dan memiliki tanggung jawab kekayaan yang terpisah dari pendirinya.³⁰
2. Pernyataan kehendak para pihak (*shighat 'aqd*).
- Shighat akad atau ijab kabul (serah terima), yaitu perkataan yang menunjukkan kepada kedua belah pihak.
- Syarat *shighat 'aqd* di antaranya, yaitu :
- a. *Jala'ulma'na* (dinyatakan dengan ungkapan yang jelas dan pasti maknanya), sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki.
- b. *Tawafuq/tathabuy bainal ijab wal Kabul* (persesuaian antara ijab dan kabul).

³⁰ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 15

- c. *Jazmul iradataini* (ijab dan kabul mencerminkan kehendak masing-masing pihak secara pasti, mantap) tidak menunjukkan adanya unsur keraguan dan paksaan.
- d. *Ittishad al-Kabul bil-hijab*, di mana kedua pihak dapat hadir dalam suatu majlis.

3. Objek akad (*mahallul'aqd*).

Syarat objek akad, yaitu :

- a. Halal menurut syara'
- b. Bermanfaat (bukan merusak atau digunakan untuk merusak)
- c. Dimiliki sendiri atau atas kuasa pemilik
- d. Dapat diserahterimakan (benda dalam kekuasaan)
- e. Dengan harga jelas

4. Tujuan akad (*maudhu' al-'aqd*).

Syarat akad atau *maudhu'u 'aqd* atau dalam istilah hukum perjanjian disebut Prestasi. Tujuan ini sesuai dengan jenis akadnya, seperti tujuan dalam jual beli (*buyu'/ba'i*) ialah menyerahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan ganti/bayaran (*iwadh*), dalam hibah ialah menyerahkan barang kepada penerima hibah (*mauhub*) tanpa ganti (*iwadh*) dan pada akad sewa (*ijarah*) ialah memberikan manfaat dengan ganti (*iwadh*).³¹

Dalam KUH Perdata hal ini merupakan suatu prestasi (hal yang dapat dituntut oleh satu pihak kepada pihak lainnya), yang dirumuskan

³¹ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), h. 147

dengan menyerahkan barang, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Syarat-syarat dari tujuan akad atau prestasi ini yaitu :

- a. Baru ada pada saat dilaksanakan akad
- b. Berlangsung adanya hingga berakhirnya akad
- c. Tujuan akad harus dibenarkan *syara'*

Di samping rukun, syarat akad juga harus terpenuhi agar akad itu sah. Adapun syarat-syarat itu adalah:³²

- a. Syarat adanya sebuah akad (*Syarth Al-In-Iqod*). Syarat adanya akad adalah sesuatu yang mesti ada agar keberadaan suatu akad diakui *syara'*, syarat ini terbagi dua, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap akad. Syarat umum ada tiga, yaitu:

- 1) Syarat-syarat yang harus dipenuhi pada lima rukun akad yaitu, shighat, objek akad (*maqud alaih*), para pihak yang berakad (*aqidain*), tujuan pokok akad, dan kesepakatan.
- 2) Akad itu bukan akad yang terlarang, seperti mengandung unsur *khilaf* atau pertentangan, dilakukan di bawah *ikrah* atau paksaan, *tagrir* atau penipuan, dan *ghubn* atau penyamaran.
- 3) Akad itu harus bermanfaat. Adapun syarat khusus adanya sebuah akad adalah syarat tambahan yang harus dipenuhi oleh suatu akad khusus seperti adanya saksi dalam akad.

³² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Fajar Interpratama Mandiri, 2012), h. 74

b. Syarat sah akad. Secara umum para fukaha menyatakan bahwa syarat sahnya akad adalah tidak terdapatnya lima hal perusak sahnya (*mufsid*) dalam akad, yaitu:

- 1) Ketidakjelasan jenis yang menyebabkan pertengkaran (*al-Jilalah*)
- 2) Adanya paksaan (*ikrah*)
- 3) Membatasi kepemilikan terhadap suatu barang (*tauqif*)
- 4) Terdapat unsur tipuan (*gharar*)
- 5) Terdapat bahaya dalam pelaksanaan akad (*dharar*)

c. Syarat berlakunya (*nafidz*) akad. Syarat ini bermaksud berlangsungnya akad tidak tergantung pada izin orang lain. Syarat berlakunya sebuah akad yaitu:³³

- 1) Adanya kepemilikan terhadap barang atau adanya otoritas (*Al-Wilayah*) untuk mengadakan akad, baik secara langsung ataupun perwakilan.
- 2) Pada barang atau jasa tersebut tidak terdapat hak orang.

d. Syarat adanya kekuatan hukum (*Luzum Abad*) suatu akad baru bersifat mengikat apabila ia terbebas dari segala macam hak khiyar (hak untuk meneruskan atau membatalkan transaksi).

3. Macam-Macam Akad

Akad terbagi kepada beberapa macam, yaitu dilihat dari keabsahannya, maka akad terbagi kepada tiga kategori:

³³ Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian Ekonomi, Bisnis Dan Sosial, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 25.

- a. Akad yang Sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat- syaratnya.
Akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur ghalat atau khilaf, dilakukan di bawah ikrah atau paksaan, taghrir atau tipuan atau penyamaran.
- b. Akad yang Fasad adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat- syaratnya, tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahat.
- c. Akad yang Batal adalah akad yang kurang rukun dan atau syarat- syaratnya.

Dilihat dari penamaannya, maka akad dibagi menjadi dua, yaitu: ³⁴

- a. Akad Bernama (*Al-Uqud Al-Musamma*)

Yaitu merupakan akad yang penamaannya telah disebutkan dan diterangkan ketentuannya oleh syara'.

- b. Akad Tidak Bernama (*Al-'Uqud Ghair Al-Musamma*)

Yaitu merupakan akad yang belum dinamai syara', tetapi muncul dalam perjalanan sejarah umat Islam yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman, seperti: *Istishna'*, *Ba'ial-wafa* *Ba'iistijrar* *Ba'ial-tahkir*. Akad-akad tidak bernama ini biasanya didasarkan pada dalil hukum berupa *'urf*, *istihsan*, *qiyas*, dan *masalih mursalah*. Akan tetapi, akhirnya ini menjadi bernama.

Dilihat dari zatnya, maka akad dibagi kepada dua, yaitu: ³⁵

³⁴ Faturahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 44

³⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h.

a. Akad Terhadap Benda yang Berwujud (*'Ainiyyah*)

Sesuatu akad dianggap sah apabila benda atau objek akad tersebut telah diserahterimakan. Apabila objek akad ini tidak atau belum diserahterimakan, maka akad ini dianggap keabsahannya belum sempurna.

b. Akad Terhadap Benda Tidak Berwujud (*Ghairal al-'Ainiyyah*).

Sesuatu akad dianggap sah setelah terjadinya *shighat* (ijab qabul) sekalipun objek akadnya belum diserahterimakan.

Dilihat dari kedudukannya, maka akad dibagi kepada dua bagian, yaitu:

a. Akad pokok (*Al-'aqdal-ashli*)

Akad pokok yaitu akad berdiri sendiri yang keberadaannya tidak tergantung kepada suatu hal lain. Termasuk ke dalam jenis ini adalah semua akad yang keberadaannya karena dirinya sendiri, seperti akad jual beli, sewa menyewa, penitipan, dan seterusnya.

b. Akad asesoir (*Al-'aqd at-taba'i*)

Akad asesoir adalah akad yang keberadaannya tidak berdiri sendiri. melainkan tergantung kepada suatu hak yang menjadi dasar ada dan tidaknya atau sah dan tidak sahnya akad tersebut. Termasuk dalam kategori ini adalah akad penanggungan (*al-kafalah*) akad gadai (*al-rahn*). Kedua akad ini merupakan perjanjian untuk menjamin, karena itu keduanya tidak ada apabila hak-hak yang dijamin tidak ada. Terhadap akad jenis ini berlaku kaidah hukum Islam yang berbunyi

"suatu yang mengikuti mengikuti" (*at-tabi' tabi'*). Artinya perjanjian asesoir ini yang mengikuti kepada pinjaman pokok, hukumnya mengikuti perjanjian pokok tersebut.

Dilihat dari segi unsur tempo dalam akad, maka akad dibagi kepada dua, yaitu:³⁶

a. Akad bertempo (*Al-'aqdal-zamani*)

Akad bertempo adalah akad yang di dalamnya unsur waktu merupakan unsur asasi, dalam arti unsur unsur waktu merupakan bagian dari isi perjanjian.

b. Akad tidak bertempo (*Al-'aqd al-fauri*)

Akad tidak bertempo adalah akad di mana unsur waktu tidak merupakan bagian dari isi perjanjian.

Dilihat dari segi terjadinya/keberlakuannya, maka akad dibagi menjadi tiga, yaitu:

a. Akad Konsensual (*Al-'aqd al-radha'i*)

Perjanjian yang bersifat konsensual adalah perjanjian yang terjadi hanya karena adanya pertemuan kehendak atau kesepakatan para pihak. Suatu akad yang untuk terciptanya cukup berdasarkan pada kesepakatan para pihak tanpa diperlukan formalitas-formalitas tertentu.

³⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 77-78

b. Akad Formalistik (*Al-'aqd al-syakli*)

Akad yang tunduk kepada syarat-syarat formalitas yang ditentukan oleh pembuat hukum, di mana apabila syarat-syarat itu tidak terpenuhi akad tidak sah.

c. Akad riil (*Al-'aqd al-'aini*)

Akad yang untuk terjadinya diharuskan adanya penyerahan objek. Apabila tidak dilakukan penyerahan, akad dianggap belum terjadi dan belum menimbulkan akibat hukum. Dengan kata lain, perjanjian yang bersifat riil adalah perjanjian yang nyata, karena adanya pertemuan kehendak juga masih perlu adanya pengalihan bendanya.

Dilihat dari segi sifat mengikatnya, maka akad dibagi kepada dua, yaitu:³⁷

a. Akad yang mengikat secara pasti (akad *lazim*), artinya tidak boleh di *fasakh* (dibatalkan secara sepihak).

Akad jenis ini dapat dibedakan menjadi dua macam lagi, yaitu pertama, akad mengikat kedua belah pihak seperti akad jual beli, sewa menyewa, perdamaian dan seterusnya. Dalam akad jual beli masing-masing pihak tidak dapat membatalkan perjanjian jual beli tanpa persetujuan pihak lain. Kedua, akad mengikat satu pihak, yaitu akad di mana salah satu pihak tidak dapat membatalkan perjanjian tanpa persetujuan pihak lain, akan tetapi pihak lain dapat membatalkannya tanpa persetujuan pihak pertama, seperti akad penanggungan (*kafalah*), gadai (*rahn*).

³⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), h. 36

- b. Akad yang mengikat secara tidak pasti (akad tidak mengikat/ *ghairu lazim*), yaitu akad yang dapat di-fasakh oleh dua pihak atau oleh satu pihak.³⁸

Dilihat dari bentuknya, akad dibagi kepada dua, yaitu:

- a. Akad tidak tertulis, yaitu akad yang dibuat secara lisan saja dan biasanya terjadi pada akad yang sederhana
- b. Akad tertulis, yaitu akad yang yang dituangkan dalam bentuk tulisan/akta baik akta autentik maupun akta di bawah tangan.

Dilihat dari motif yang mendasarinya, akad dibagi kepada dua macam, yaitu:³⁹

- a. Akad Tabarru'

Jenis akad yang berkaitan dengan transaksi non-profit transaksi yang tidak bertujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Yang termasuk dalam akad tabarru' ini adalah *al- gardh, al-rahn, hiwalah, wakalah, kafalah, wadi'ah, hibah, hadiah, wakaf. dan shadaqah.*

- b. Akad Mu'awadah atau Akad Tijarah

Akad yang bertujuan untuk mendapatkan imbalan berupa keuntungan tertentu. Atau dengan kata lain akad ini menyangkut transaksi bisnis dengan motif untuk mendapatkan laba (*profit oriented*). Yang termasuk akad *mu'awadah* ini adalah akad berdasarkan akad jual beli (*ba'ial-murabahah, akad salam, akad istishna'*), akad berdasarkan akad bagi

81 ³⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h.

³⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), h. 37

hasil (*al-mudharabah*, *al-musyarakah*), akad berdasarkan prinsip sewa menyewa (*ijarah* dan *ijarah muntahiya bit tamlik*).

Dilihat dari segi dilarang atau tidak dilarang oleh *syara'*, akad dibedakan menjadi dua, yaitu:⁴⁰

a. Akad *masyru'*.

Akad *masyru'* adalah akad yang dibenarkan oleh *syara'* untuk dibuat dan tidak ada larangan untuk menutupnya, seperti akad-akad yang sudah dikenal luas semisal jual beli, sewa menyewa, *mudharabah* dan sebagainya.

b. Akad *mamnu'ah* (akad terlarang).

Akad terlarang adalah akad yang dilarang oleh *syara'* untuk dibuat seperti akad jual beli janin, akad donasi harta anak di bawah umur, akad yang bertentangan dengan akhlak Islam (kesusilaan) dan ketertiban umum seperti sewa menyewa untuk melakukan kejahatan, akad nikah *mut'ah*. Termasuk juga akad yang dilarang dalam beberapa mazhab adalah jual beli kembali (*ba'i al-inah*).

4. Sah dan Batalnya Akad

Suatu perjanjian (akad) tidak cukup hanya ada secara faktual tetapi keberadaannya juga harus sah secara *syar'i* (yuridis) agar perjanjian (akad) tersebut dapat melahirkan akibat-akibat hukum yang dikehendaki oleh para pihak yang membuatnya. Untuk itu suatu akad harus memenuhi unsur-

⁴⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h.

unsur pokok dan syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum. Hanya saja, syarat-syarat akad itu beragam macamnya. Ada syarat-syarat terbentuknya akad, ada syarat-syarat keabsahan akad, ada syarat-syarat berlakunya akibat hukum akad, dan ada syarat-syarat mengikatnya akad. Rukun (unsur) akad, seperti telah disinggung terdahulu, meliputi empat macam dalam doktrin hukum Islam kontemporer yaitu:⁴¹

- a. Para pihak yang membuat akad.
- b. Pernyataan kehendak atau pernyataan perizinan (yang meliputi ijab dan kabul).
- c. Objek akad.
- d. Tujuan akad.

Masing-masing rukun ini memerlukan syarat-syarat agar rukun tersebut dapat membentuk yang kemudian disebut syarat-syarat terbentuknya akad, yang keseluruhannya meliputi delapan macam, yaitu:

- a. Tamyiz (berakal)
- b. Berbilang pihak, kedua syarat ini merupakan syarat dari rukun pertama, yaitu para pihak yang membuat akad.
- c. Persesuaian ijab dan kabul.
- d. Kesatuan majlis akad; syarat (3) dan (4) merupakan syarat dari rukun kedua, yaitu pernyataan kehendak (perizinan, persetujuan, *ar-ridha*).
- e. Dapat diserahkan.
- f. Tertentu atau dapat ditentukan.

⁴¹ Ibid, h. 242

- g. Dapat diperdagangkan dan tiga syarat terakhir ini merupakan syarat dari rukun ketiga, yaitu objek akad.
- h. Tidak bertentangan dengan syarak.

Hanya saja, dengan terpenuhinya keempat rukun dan kedelapan syarat di atas, akad belum semuanya menjadi sah. Meskipun sudah terbentuk, namun harus dipenuhi beberapa kualifikasi lagi untuk sahnya akad, yaitu:⁴²

- a. Bebas dari garar.
- b. Bebas dari kerugian yang menyertai penyerahan.
- c. Bebas dari syarat-syarat fasid.
- d. Bebas dari riba untuk akad atas beban.

Adanya garar, adanya kerugian yang menyertai penyerahan, adanya syarat fasid dalam akad, dan adanya unsur riba (dan menurut jumhur adanya paksaan) membuat suatu akad menjadi fasid menurut mazhab Hanafi atau batal menurut mazhab lainnya yang tidak membedakan fasid dan batal.⁴³

Suatu akad menjadi sah apabila rukun-rukun dan syarat-syarat tersebut dipenuhi, dan tidak sah apabila rukun dan syarat yang dimaksud tidak dipenuhi. Akan tetapi, oleh karena syarat-syarat akad itu beragam jenisnya, maka kebatalan dan keabsahan akad menjadi bertingkat-tingkat sesuai dengan sejauh mana rukun dan syarat-syarat itu terpenuhi. Dalam mazhab Hanafi tingkat kebatalan dan keabsahan itu dibedakan menjadi lima

⁴² Chairuman Pasaribu, Suharwadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 50

⁴³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 243.

peringkat yang sekaligus menggambarkan urutan akad dari yang paling tidak sah hingga kepada yang paling tinggi tingkat keabsahannya. Tingkat-tingkat tersebut adalah:

- a. Akad batal,
- b. Akad fasid,
- c. Akad maukuf,
- d. Akad nafiz gair lazim,
- e. Akad nafiz lazim.

Mazhab-mazhab lain tidak membedakan akad batal dan akad fasid, bagi mereka keduanya adalah sama, yaitu sama-sama merupakan akad yang batal dan tidak ada wujudnya sehingga tidak memberikan akibat hukum apa pun.⁴⁴

Keseluruhan akad dalam berbagai tingkat kebatalan dan keabsahan sebagaimana tersebut di atas dibedakan menjadi dua golongan pokok, yaitu:

- a. Akad yang tidak sah, yang meliputi akad batal dan akad fasid.
- b. Akad yang sah dengan tiga tingkatan, yaitu akad maukuf, akad nafidz ghair lazim (akad yang sudah dapat dilaksanakan akibat hukumnya, akan tetapi belum mengikat penuh karena salah satu pihak atau keduanya masih dapat membatalkannya secara sepihak) dan akad nafidz lazim (akad yang sudah dapat dilaksanakan akibat hukumnya dan telah mengikat penuh). Akan tetapi, terdapat perbedaan pendapat tentang

⁴⁴ Abd ar-Razzaq Hasan Faraj, *Nazhariyyah al-aqd al-Maukuf fi al-Fiqh al-Islami: Dirasah Muqaranah bi al-Qanun al-Madani* (Kairo: Dar an-Nahdhah al-Arabiyyah, 1996), h. 18.

akad maukuf apakah termasuk kategori akad yang tidak sah ataukah digolongkan kepada akad yang sah.

Berikut ini akan dibahas empat peringkat akad yang belum mencapai tingkat akad sempurna yang memenuhi seluruh rukun dan syaratnya, yaitu akad batil, akad fasid, akad maukuf dan akad nafidz gair lazim. Adapun akad nafidz lazim, maka itu adalah akad yang mengikat secara penuh dan akan dibahas akibat-akibat hukum yang ditimbulkannya pada bab berikutnya.

Di sini hanya dibicarakan akad yang tidak memenuhi syarat-syaratnya secara sempurna.⁴⁵

a. Akad Batil (Batal)

Pengertian kata *batil* dalam bahasa Indonesia berasal dari kata Arab bathil, yang secara leksikal berarti sia-sia, hampa, tidak ada substansi dan hakikatnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan batil berarti batal, sia-sia tidak benar.⁴⁶ Dan batal diartikan tidak berlaku, tidak sah, sia-sia. Jadi dalam Kamus Besar tersebut, batil dan batal sama artinya. Akan tetapi, dalam bahasa aslinya keduanya berbeda bentuknya, karena batal adalah bentuk masdar dan berarti kebatalan, sedang batil adalah kata sifat yang berarti tidak sah, tidak berlaku. Di sini digunakan kata batil sesuai dengan bentuk aslinya.

Ahli-ahli hukum Hanafi mendefinisikan akad batil secara singkat. sebagai akad yang secara syarak tidak sah pokok dan sifatnya Yang

⁴⁵ Ibid, h. 30.

⁴⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 98.

dimaksud dengan akad yang pokoknya tidak memenuhi ketentuan syarak dan karena itu tidak sah adalah akad yang tidak memenuhi seluruh rukun yang tiga dan syarat terbentuknya akad yang tujuh, sebagaimana yang telah disebutkan. Apabila salah satu saja dari rukun dan syarat terbentuknya akad tersebut tidak terpenuhi, maka akad itu disebut akad batil yang tidak ada wujudnya. Apabila pokoknya tidak sah, otomatis tidak sah sifatnya.⁴⁷ Hukum akad batil, yaitu akad yang tidak memenuhi rukun dan syarat terbentuknya akad, dapat diringkas sebagai berikut:

Pertama, bahwa akad tersebut tidak ada wujudnya secara syar'i (secara syar'i tidak pernah dianggap ada), dan oleh karena itu tidak melahirkan akibat hukum apa pun. Akad anak kecil atau orang tidak waras akalnya, atau akad yang objeknya benda berharga dalam pandangan syarak seperti narkoba atau benda mubah yang tidak bertuan adalah batil dan tidak menimbulkan akibat hukum apa pun.

Kedua, bahwa apabila telah dilaksanakan oleh para pihak, akad batil itu wajib dikembalikan kepada keadaan semula pada waktu sebelum dilaksanakannya akad batil tersebut.

Ketiga, akad batil tidak berlaku pembenaran dengan cara memberi izin misalnya, karena transaksi tersebut didasarkan kepada akad yang sebenarnya tidak ada secara *syar'i* dan juga karena pembenaran hanya berlaku terhadap akad maukuf.

⁴⁷ Ibn Nujaim, al-Asybah wa an-Nazha'ir (Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiyyah, 1985), h. 337.

Keempat, akad batil tidak perlu difasakh (dilakukan pembatalan) karena akad ini sejak semula adalah batal dan tidak pernah ada.

Kelima, ketentuan lewat waktu (at-taqadum) tidak berlaku terhadap kebatalan.

b. Akad Fasid

Kata fasid berasal dari bahasa Arab dan merupakan kata sifat yang berarti rusak. Kata bendanya adalah fasad dan mafsadah yang berarti kerusakan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan fasid yaitu suatu yang rusak, busuk (perbuatan, pekerjaan, isi hati).⁴⁸

Akad fasid, menurut ahli-ahli hukum, adalah akad yang menurut syarat sah pokoknya, tetapi tidak sah sifatnya. Perbedaannya dengan akad batil adalah bahwa akad batil tidak sah baik pokok maupun sifatnya. Yang dimaksud dengan pokok di sini adalah rukun-rukun dan syarat-syarat terbentuknya akad, dan yang dimaksud dengan sifat adalah syarat-syarat keabsahan akad yang telah disebutkan terdahulu.

Jadi singkatnya akad batil adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukun atau syarat pembentukan akad. Sedangkan akad fasid adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat pembentukan akad, akan tetapi tidak memenuhi syarat keabsahan akad.⁴⁹

Pada dasarnya, akad fasid adalah akad tidak sah karena terlarang. Dan tidak menimbulkan akibat hukum bahkan masing-masing pihak dapat mengajukan pembelaan untuk tidak melaksanakannya dengan

⁴⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 430.

⁴⁹ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Cet. Ke 3, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), h. 83.

berdasarkan ketidaksahan tersebut, dan akad fasid wajib difasakh baik oleh para pihak maupun oleh hakim.

Sebelum terjadinya pelaksanaan (penyerahan objek), akad fasid tidak dapat memindahkan milik, dan dengan akad fasid pihak kedua tidak dapat menerima pemilikan atas objek. Masing-masing pihak tidak dapat memaksa pihak lainnya untuk melaksanakan dan masing-masing dapat mengajukan pembelaan dengan kefasidan tersebut.

Sesudah terjadinya pelaksanaan akad (dalam pelaksanaan berupa penyerahan suatu benda, maka sesudah penyerahan benda dan diterima oleh pihak kedua), akad fasid mempunyai akibat hukum tertentu, yaitu, menurut mazhab Hanafi, dapat memindahkan hak milik. Hanya saja, hak milik ini bukan hak milik sempurna dan mutlak, melainkan suatu pemilikan dalam bentuk khusus, yaitu penerima dapat melakukan tindakan hukum terhadapnya, tetapi tidak dapat menikmatinya.⁵⁰

c. Akad Maukuf

Kata maukuf diambil dari kata bahasa Arab, *mauquf* yang berarti terhenti, tergantung, atau dihentikan. Ada kaitannya dengan kata maukuf yang berarti tempat perhentian sementara.⁵¹

Akad maukuf adalah akad yang sah karena sudah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya maupun syarat keabsahannya, namun akibat hukumnya belum dapat dilaksanakan. Sebab belum dilaksanakannya

⁵⁰ As-Sansuri, Mashadir *al-Fiqh al-Islami*, (kairo: Institut Studi Arab, Liga Arab 1956), h. 157.

⁵¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 639.

adalah karena syarat dapat dilaksanakan akibat hukumnya belum dipenuhi, yaitu adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan, dan adanya kewenangan atas objek akad.⁵²

Sebab Akad Menjadi Maukuf. Pertama tidak adanya kewenangan yang cukup atas tindakan hukum yang dilakukan, dengan kata lain kekurangan kecakapan dan kedua Tidak adanya kewenangan yang cukup atas objek akad karena adanya hak orang lain pada objek tersebut.

Tidak adanya kewenangan cukup atas objek dan adanya hak orang lain terkait pada objek akad terjadi dalam beberapa bentuk. Di antara yang penting adalah bahwa pelaku tindakan tidak mempunyai hak milik atas objek yang karenanya ia melakukan tindakan hukum atau tidak mendapat pemberian kuasa (perwakilan) dari pemiliknya atau mendapat pemberian kuasa (perwakilan) namun tindakannya melampaui pemberian kuasa (perwakilan) yang diberikan kepadanya. Pelaku tindakan seperti ini disebut *al-fudhuli* (pelaku tanpa kewenangan).⁵³

Hukum Akad Maukuf yaitu sebelum adanya pembenaran oleh pihak yang berhak, hukum akad maukuf itu adalah sah, hanya saja akibat hukumnya digantungkan. Artinya akibat hukumnya masih ditangguhkan hingga akad itu dibenarkan atau sebaliknya dibatalkan

⁵² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 253.

⁵³ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah*, Cet Ke-2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), h. 54.

(tidak diakui) oleh pihak yang berhak untuk memberikan ratifikasi atau pembatalan tersebut. Apabila sudah ada pembenaran dari pihak yang berhak, akibat hukumnya berlaku terhitung sejak dibuatnya akad tersebut, bukan sejak terbitnya pembenaran. Akan tetapi apabila pihak yang berhak tidak meratifikasi, maka akad tersebut batal demi hukum

d. Akad Nafidz Gair Lazim

Pengertian Nafidz adalah kata bahasa Arab yang belum terserap ke dalam bahasa Indonesia, dan secara harfiah berarti berlaku dan terlaksana. Akad nafidz artinya adalah akad yang sudah dapat diberlakukan atau dilaksanakan akibat hukumnya. Namun di sisi lain, meskipun para pihak telah memenuhi dua syarat tersebut sehingga akadnya telah nafidz (dapat dilaksanakan akibat hukumnya), masih ada kemungkinan bahwa akad tersebut belum mengikat secara penuh oleh karena masing-masing pihak atau salah satu dari mereka mempunyai apa yang disebut dengan hak-hak khiyar atau memang karena sifat asli dari akad itu memang tidak mengikat penuh.

Akad yang tidak mengikat penuh itu disebut gair lazim (tidak mengikat penuh) dalam arti masing-masing pihak atau salah satu mempunyai hak untuk memfasakh (membatalkan) akad secara sepihak karena alasan yang disebutkan di atas, akad yang telah memenuhi dua syarat dapat dilaksanakannya segera akibat hukum akad, namun akad itu terbuka untuk difasakh secara sepihak karena masing-masing atau salah satu pihak mempunyai hak khiyar tertentu atau karena memang

sifat asli akad itu demikian disebut akad nafidz gair lazim. Hukum akad nafidz gair lazim yaitu pada dasarnya suatu perjanjian (akad) apabila telah dibuat secara sah dan telah memenuhi syarat berlakunya akibat hukum akad, maka akad tersebut mengikat secara penuh dan tidak boleh salah satu pihak membatalkannya secara sepihak tanpa persetujuan pihak lain.

Akan tetapi terdapat beberapa macam akad yang memang sifat aslinya terbuka untuk difasakh secara sepihak oleh salah satu pihak tanpa persetujuan pihak lain. Di samping itu, terdapat pula akad yang salah satu pihak mempunyai hak khiyar (opsi) untuk meneruskan atau memfasakh akadnya, baik karena hak khiyar itu dimasukkan dalam perjanjian sebagai bagian dari klausulnya, maupun karena ditetapkan syarak. Ada banyak jenis khiyar dalam akad. Sebagiannya terkait dengan sifat akad sehingga membuat akad tidak mengikat secara penuh, antara lain yaitu.⁵⁴

Khiyar syarat, yaitu khiyar (hak opsi) yang disyaratkan oleh salah satu atau kedua pihak dalam akad bahwa mereka mempunyai hak untuk membatalkan akad dalam waktu tertentu dan jika tidak dibatalkan selama waktu itu, maka akadnya berlangsung (tidak batal). Khiyar syarat ini memberikan kesempatan kepada para pihak yang mensyaratkannya untuk memikirkan dan mempertimbangkan perjanjian bersangkutan lebih dalam untuk kemudian mengambil keputusan final.

⁵⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 258.

Khiyar ini sesungguhnya merupakan perkecualian terhadap asas umum bahwa perjanjian timbal balik tidak dapat digantungkan kepada suatu syarat, dan khiyar syarat ini sesungguhnya adalah penggantungan akad kepada suatu syarat. Perkecualian ini dikarenakan adanya hadis Nabi Saw. yang membenarkan adanya khiyar syarat tersebut. Lama waktu khiyar syarat ini, dalam hadis disebutkan tiga hari, akan tetapi ijthad para fukaha menyatakan tergantung kepada kebutuhan, dan menurut penulis dapat diperjanjikan melalui kesepakatan.

Khiyar *at-ta'yin* (opsi penentuan), yaitu suatu opsi yang diajukan sebagai klausul dalam perjanjian biasanya oleh pihak kedua bahwa objek perjanjian itu terdiri beberapa macam yang dapat dipilih untuk ditentukan olehnya.⁵⁵

Khiyar *ar-ru'yah* (opsi setelah melihat), yaitu khiyar (opsi) yang dimiliki oleh pihak yang ketika melakukan transaksi belum mengetahui objeknya, sehingga ketika ia melihat objeknya ia mempunyai opsi untuk membatalkan akad atau meneruskannya. Berbeda dengan dua khiyar sebelumnya yang diperjanjikan para pihak, khiyar ini tidak diperjanjikan, melainkan merupakan ketentuan undang-undang syarak, yaitu karena oleh ketentuan hadis Nabi Saw. Syarat perjanjian yang menyangkut kesepakatan dan kecakapan disebut syarat subjektif, sedangkan yang berkenaan dengan hal tertentu dan sebab yang halal disebut syarat objektif.

⁵⁵ *Ibid*, h. 259

5. Akibat Hukum Akad

a. Akibat hukum akad dalam kaitan dengan para pihak

Dalam berbagai hukuma perjanjian, apabila suatu perjanjian (akad) telah memenuhi semua syarat-syaratnya dan menurut hukum perjanjian Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, maka perjanjian tersebut mengikat dan wajib dipenuhi serta berlakua sebagai hukum.⁵⁶ Perjanjian itu menimbulkan akibat hukum yang wajib dipenuhi oleh pihak-pihak terkait, dalam Pasal 1338 (1) KUH Perdata ditegaskan, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam hal orang-orang yang terikat oleh perjanjian itu bahwa pada dasarnya perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1315 KUH Perdata yang berbunyi, pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.⁵⁷ Dalam hukum perjanjian Islam, seperti halnya dalam hukum lain, pada dasarnya akibat yang timbul dari suatu perjanjian (akad) hanya berlaku terhadap para pihak yang membuatnya dan tidak berlaku terhadap para pihak yang membuatnya dan tidak berlaku terhadap pihak lain di luar mereka.

Sebagaimana ditegaskan, bahwa pada dasarnya akibat-akibat hukum dari suatu akad hanya berlaku terhadap para pihak yang

⁵⁶ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 73.

⁵⁷ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 325.

membuatnya. Namun dalam batas tertentu akibat hukum tersebut juga terkait terhadap para pengoper hak, para kreditor dan pihak ketiga.

b. Akibat hukum akad dalam kaitannya dengan isi.

Akibat hukum akad (perjanjian) dalam kaitan dengan isinya yang wajib dilaksanakan oleh pihak terkait. Untuk memenuhi akibat hukum yang timbul dari suatu perjanjian perlu dilakukan penentuan ruang lingkup isi perjanjian. Dalam menghadapi suatu akad, hakim atau ahli hukum tidak hanya berusaha menentukan apa yang menjadi maksud para pihak dengan menafsirkan akad itu, tetapi juga berusaha menentukan cakupan isi akad itu, yaitu cakupan prestasi yang menjadi hak salah satu pihak dan menjadi kewajiban pihak lain.

Suatu akad dengan ruang lingkup isinya, sebagaimana ditentukan penafsiran dan penentuan cakupan prestasi para pihak, mengikat untuk dipenuhi dan menjadi kewajiban para pihak untuk melaksanakannya sebagaimana dituntut oleh isi akad tersebut. Akan tetapi, bisa terjadi bahwa isi akad itu tidak adil atau berisi klausul yang memberatkan karena lahir dari suatu perjanjian baku, dimana salah satu pihak tidak mempunyai banyak pilihan dalam menentukan klausul tersebut.

6. Asas Akad

Seperti telah dimaklumi, bahwa sistem hukum merupakan keseluruhan aturan hukum yang disusun secara terpadu berdasarkan asas-asas tertentu. Sebagai suatu sistem, hukum terdiri dari sub-sub sistem yang satu sama lain berkaitan dalam hubungan yang seimbang dan serasi tidak tumpang

tindih, tidak berbenturan karena asas-asasnya yang terpadu. Sistem hukum Islam merupakan keseluruhan aturan hukum yang disusun secara terpadu berdasarkan asas-asas tertentu. Sistem hukum Islam terdiri dari sub-sub sistem yang satu sama lain berkaitan dalam hubungan yang seimbang.

Asas-asas perjanjian merupakan konkretisasi dari norma-norma filosofis, yaitu nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi ajaran Islam. Asas-asas perjanjian dalam hukum Islam terdiri dari asas kebolehan (*mabda' al-ibahah*), asas kebebasan berkontrak (*mabda' hurriyyah atta'aqud*), asas konsensualisme/kesepakatan (*mabda' ar-radha'iyah*) asas janji itu mengikat, asas keseimbangan (*mabda' at-tawazun fi al mu'awadhah*), asas kemaslahatan (tidak memberatkan), asas amanah dan asas keadilan. Asas ibahah atau kebolehan merupakan asas umum hukum Islam dalam bidang muamalat yang dirumuskan pada kalimat “pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya”.

Hal ini bertolak belakang dengan asas yang berlaku dalam ibadah bahwa tidak ada ibadah kecuali apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw. Jika dihubungkan dengan tindakan hukum dan perjanjian maka perjanjian apa pun dapat dibuat sejauh tidak ada larangan khusus mengenai perjanjian tersebut. Asas kebebasan berakad dalam hukum Islam dibatasi dengan larangan makan harta sesama dengan jalan bathil. Yang dimaksud dengan makan harta sesama dengan jalan bathil adalah makan harta orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan dan tidak sah menurut hukum Syariah. Asas konsensual berlandaskan pada kaidah hukum Islam

pada dasarnya perjanjian itu adalah kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan melalui janji. Asas janji itu mengikat berlandaskan pada perintah dalam Al Qur'an agar memenuhi janji.

Dalam kaidah ushul fikih, perintah itu pada dasarnya menunjukkan wajib. Di antara ayat dan hadits dimaksud adalah dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu akan dimintakan pertanggung jawabannya. Hukum perjanjian Islam menekankan perlunya keseimbangan dalam perjanjian. Keseimbangan ini dapat berupa keseimbangan antara yang diberikan dengan yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul risiko. Asas kemaslahatan dimaksudkan agar akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau keadaan yang memberatkan (*masyaqqah*). Asas amanah mengandung arti bahwa para pihak yang melakukan akad harus memiliki itikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya. Dalam perjanjian Islam dituntut adanya amanah misalnya memegang rahasia, atau memberikan informasi yang sesungguhnya, tidak bohong.

Dalam hukum Islam keadilan merupakan perintah Allah yang tertera dalam Al Qur'an, berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Keadilan merupakan tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, asas-asas akad yaitu sebagai berikut:

- a. Ikhtiyari/sukarela; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
- b. Amanah/menepati janji; setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji.
- c. Ikhtiyati/kehati-hatian; setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
- d. Luzum/tidak berubah; setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir.
- e. Saling menguntungkan; setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
- f. Taswiyah/kesetaraan; para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
- g. Transparansi; setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.

- h. Kemampuan; setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
- i. Taisir/kemudahan; setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.
- j. Iktikad baik; akaddilakukan dalam rangka menegakan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
- k. Sebab yang halal; tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.⁵⁸

7. Berakhirnya Akad

Berakhirnya ikatan yang mengikat antara yang berakad ini terjadi karena sesudah adanya akad. Tidak mungkin terjadi berakhir atau putusnya akad sebelum terjadinya akad. Dan akad yang batal adalah akad yang sama sekali tidak berpengaruh sama dengan anak yang lahir dalam keadaan meninggal. Akad yang putus adalah akad yang sudah sah adanya kemudian putus, baik dengan kehendak ataupun tidak. Apabila akad itu dirusakkan dengan kemauan sendiri dinamakan fasakh. Dan apabila akad rusak disebabkan sesuatu yang datang yang tidak kita hendaki, dinamakan infasakh.⁵⁹

⁵⁸Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), h. 149-150.

⁵⁹Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Cet. Ke-4, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 89.

Fasakh adakalanya wajib dan adakalanya boleh. Fasakh wajib dilakukan dalam rangka menghormati ketentuan syariah, melindungi kepentingan umum maupun khusus, menghilangkan bahaya, kerugian dan menghindari perselisihan akibat pelanggaran terhadap syarat-syarat yang ditetapkan syariah.

Fasakh terjadi karena hal-hal berikut:

a. Akad yang tidak lazim (*Jaiz*)

Akad yang dimaksud tidak lazim adalah akad yang memungkinkan pihak-pihak akad untuk membatalkan akad walaupun tanpa persetujuan pihak akad yang lain. Tetapi jika pembatalan ini merugikan pihak lain dan melanggar kesempatan, maka tidak boleh difasakh. Akad yang jaiz adakalanya bagi seluruh pihak akad dan adakalanya bagi salah satu pihak akad. Jadi dengan akad tidak lazim maka terbuka bagi pihak akad untuk memfasakh atau membatalkan akad. Jika memilih fasakh, maka akadnya berakhir.⁶⁰

b. Fasakh karena khiyar

Hak khiyar ialah hak memilih untuk membatalkan atau meneruskan akad. Hak khiyar bisa berlaku sebelum atau sesudah kesepakatan ijab dan qobul. Bagi pemilik khiyar, baik khiyar syarat, khiyar aib maupun khiyar ru'yah dibolehkan untuk membatalkan akad semata-mata karena kehendaknya. Pembatalan melalui khiyar merupakan hak salah satu pihak, karena itu menjadi kewajiban pihak lain untuk memenuhinya.

⁶⁰ Oni Sahroni, Hasanuddin, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), h. 186

Tanpa adanya hak khiyar atau kesepakatan kedua belah pihak, pembatalan dinyatakan tidak sah hukumnya. Namun syarat berlakunya khiyar ialah selama ada sebab tertentu yang terbukti dapat merugikan salah satu pihak sehingga merusak keridhaan.

c. Fasakh karena iqalah

Iqalah adalah pembatalan akad berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, apabila salah satu pihak merasa menyesal dan ingin mengundurkan diri dari akad.⁶¹

d. Fasakh karena tidak bisa dilaksanakan

Fasakh boleh dilakukan karena pihak lain tidak bisa melaksanakan kewajiban yang ditimbulkan atau akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak yang bersangkutan .

Menurut ulama fiqih, akad dapat berakhir apabila:

- a. Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu. Biasanya dalam sebuah perjanjian telah ditentukan saat kapan suatu perjanjian akan berakhir, sehingga dengan lampaunya waktu maka secara otomatis perjanjian akan berakhir. Apabila masa perjanjian yang disepakati dan yang disebutkan dalam akad telah habis atau tujuan yang dimaksudkan oleh akad secara otomatis menjadi batal.
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.

⁶¹ *Ibid*, h. 190

c. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad bisa dianggap berakhir jika:

- 1) Fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syarat tidak terpenuhi.
- 2) Berlakunya khiyar syarat, khiyar aib, atau yang lainnya.
- 3) Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak.
- 4) Tercapainya tujuan akad itu secara sempurna.

d. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hubungan ini ulama fiqh menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad.⁶²

Demikian jelaslah bahwa berakhirnya atau putusnya suatu akad itu pada umumnya dikarenakan waktu yang telah ditentukan berakhir, adanya pembatalan dari salah satu pihak, disebabkan tidak terpenuhi salah satu syarat dalam akad dan disebabkan meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad.⁶³

B. Tinjauan Pustaka

Sebelum melakukan penelitian, penulis telah membaca beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang terikat dengan judul tentang Tinjauan Hukum Islam Tentang Perjanjian dan Driver Gojek” adalah sebagai berikut:

- a. Skripsi yang dibuat oleh Harri Wardhana. tahun 2016, judul penelitian “Tinjauan Asas-asas Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

⁶² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet Ke-2, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 109.

⁶³ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah*, Cet Ke-2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), h. 61.

Terhadap Perubahan Perjanjian Kemitraan Antara PT. GO-JEK Indonesia-Surabaya” (Studi kasus di PT. Gojek Surabaya).”

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, akad awal perjanjian kemitraan tersebut telah sesuai dengan konsep akad dalam KHES, akan tetapi, ketika kebijakan sepihak dari perusahaan untuk mencicil atribut diberlakukan, hal inilah yang kemudian membuat hilangnya asas-asas dalam berakad, tidak terpenuhinya rukun akad (kesepakatan para pihak) dengan sempurna, karena adanya ‘aiba kesepakatan (cacat kehendak), sehingga membuat hukum akad tersebut tergolong pada akad fasid.⁶⁴

- b. Skripsi yang dibuat oleh Raditya Utama tahun 2012 judul penelitian “Tinjauan Yuridis Tentang Perjanjian Kerja Antara Perusahaan Dengan Pekerja Di PT. Berau Karya Indah Surabaya”

Hasil penelitian dari penulisan ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa isi dari perjanjian kerja pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang diperjanjikan oleh pihak-pihak yang ada dalam suatu perjanjian. Suatu perjanjian dimana pekerja menyatakan kesanggupan untuk bekerja pada pihak perusahaan dengan menerima upah dan perusahaan menyatakan kesanggupan untuk memperkerjakan pekerja dengan membayar upah⁶⁵.

⁶⁴ Harri Wardhana, Tinjauan Asas-asas Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Terhadap Perubahan Perjanjian Kemitraan Antara PT. GO-JEK Indonesia-Surabaya, skripsi (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016).

⁶⁵ Raditya utama, Tinjauan Yuridis Tentang Perjanjian Kerja Antara Perusahaan Dengan Pekerja Di PT. Berau Karya Indah Surabaya, skripsi (Surabaya: Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, 2012)

- c. Skripsi yang dibuat oleh M. Hendra Hartono tahun 2010 judul penelitian “Tinjauan Yuridis Perjanjian Kerja Karyawan Pada PT. Gamma Hepsi Kantor Cabang Batam Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tentang Ketenagakerjaan”

Hasil penelitian dari penulisan ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa perjanjian kerja antara karyawan dengan PT. Gamma Hepsi kantor cabang Batam ditinjau dari Undang-undang nomor 13 tahun 2003 adalah dilakukan dengan perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis, dilihat dari sifatnya perjanjian kerja itu merupakan perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu. Pelaksanaan perjanjian karyawan dengan PT. Gamma Hepsi kantor cabang Batam ditinjau menurut Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan telah sesuai dengan Undang-undang nomor 13. Namun dalam pemberian upah dan tunjangan walaupun telah diberikan sesuai dengan UMP namun belum sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 karena PT. Gamma Hepsi kantor cabang Batam tidak memberikan upah lembur kepada karyawan. Karena didalam perjanjiannya disebutkan kelebihan jam kerja sudah termasuk dalam gaji pokok⁶⁶.

⁶⁶ M. Hendra Hartono, Tinjauan Yuridis Perjanjian Kerja Karyawan Pada PT. Gamma Hepsi Kantor Cabang Batam. Ditinjau Dari Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, skripsi (Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2010).

DAFTAR PUSTAKA

- Abd ar-Razzaq Hasan Faraj, *Nazhariyyah al-aqd al-Maukuf fi al-Fiqh al-Islami: Dirasah Muqaranah bi al-Qanun al-Madani*, Kairo: Dar an-Nahdhah al-Arabiyyah, 1996.
- Azis Dahlan Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Ashshofa Burhan, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: CV Darus Sunnah, 2015.
- Dewi Gemala, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Djamil Faturahman, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Ghofur Anshori Abdul, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Hadi Sholikul, *Fiqih Muamalah*, Kudus: Nora Interprise, 2011.
- Haroen Nasrun, *Fiqih Muamalah*, Cet Ke-2, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Kamus besar bahasa indonesia pusat bahasa edisi keempat Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: Gramedia pustaka utama, 2011.
- Karim Helmi, *Fiqih Muamalah*, Cet. Ke 3, Jakarta: Raja Grafindo, 2002.
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metode Riset*, Alumni Bandung, 1986.

Wahab Khalaf Abdul, *Kaidah- Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Fajar Interpretama Mandiri, 2012.

-----, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2017.

Mashadir As-Sansuri, *Mashadir al-Fiqh al-Islami*, Kairo: Institut Studi Arab, Liga Arab, 1956.

Mohammad. Nasir, *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy Teungku, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Cet. Ke-4,
Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.

Muhammad Kadir Abdul, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.

Narbuko Cholid dan Achmad Abu, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

Nawawi Ismail, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer: Hukum Perjanjian Ekonomi, Bisnis Dan Sosial*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Nujaim Ibn, *al-Asybah wa an-Nazha'ir*, Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiyyah, 1985.

Oka Setiawan I Ketut, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Pasaribu, Chairuman, Suharwadi, K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004).

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah*, Cet Ke-2, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.

Sahroni, hasanuddin Oni, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad Dan Imlementasinya Dalam Ekonmi Syariah*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2017.

Soehartono Irawan, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995.

Soimin Soedharyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: ALFABETA, 2018.

Syafei Rachmat, *Fikih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

Sumber Online

Kamus besar bahasa indonesia dalam jaringan/online, KKBI pusat bahasa.

<https://www.gojek/about/diakses>, 01 Juli 2020.

Sumber Lainnya

Alfiyah Agustina, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Antara Mitra Pengendara Dengan PT. Gojek Indonesia”. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017.

Harri Wardhana, “Tinjauan Asas-asas Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Terhadap Perubahan Perjanjian Kemitraan Antara PT. GO-JEK Indonesia-Surabaya”. Skripsi Program Sarjana Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016.

M. Hendra Hartono, “Tinjauan Yuridis Perjanjian Kerja Karyawan Pada PT. Gamma Heps Kantor Cabang Batam. Ditinjau Dari Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”. Skripsi Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2010.

Raditya utama, “Tinjauan Yuridis Tentang Perjanjian Kerja Antara Perusahaan Dengan Pekerja Di PT. Berau Karya Indah Surabaya”. Skripsi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, 2012.

Perjanjian kemitraan dalam aplikasi gojek, tanggal 1 Juli